



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DUDUNG RUDI HENDRATNA**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH**
3. NHK : **59207**

**II. DATA HARTA**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>1.930.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m <sup>2</sup> /90 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000                    |            |                      |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m <sup>2</sup> /60 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000                     |            |                      |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.120 m <sup>2</sup> /388 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI , Rp. 1.100.000.000 |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>467.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000  |            |                      |
| 2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000  |            |                      |
| 3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO LUX LUX SILVER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000  |            |                      |
| 4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000   |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>276.000.000</b>   |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>   | <b>Rp.</b> | <b>65.844.763</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>   | <b>Rp.</b> | <b>2.738.844.763</b> |



III. HUTANG

Rp. 395.371.947

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.343.472.816

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JOKO JUWIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN**
3. NHK : **131772**

**II. DATA HARTA**

- |  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>1.395.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000 |            |                      |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/330 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 650.000.000       |            |                      |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/74 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000  |            |                      |
| 4. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000                     |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>98.200.000</b>    |
| 1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000                           |            |                      |
| 2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000                     |            |                      |
| 3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2006 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000                    |            |                      |
| 4. MOTOR, HONDA GRAND ASTREA Tahun 1996, WARISAN Rp. 2.000.000                                 |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>144.000.000</b>   |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>49.896.000</b>    |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>   | <b>Rp.</b> | <b>503.566.000</b>   |



|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| F. HARTA LAINNYA                  | Rp. | ----          |
| Sub Total                         | Rp. | 2.190.662.000 |
| III. HUTANG                       | Rp. | ----          |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.190.662.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADI SUHARNA  
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BALIKPAPAN  
3. NHK : 475266

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.163.029.350

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.163.029.350

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 339.925.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
7.125.000  
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
180.500.000  
3. MOBIL, SUZUKI S-PRESSO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
152.300.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.575.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 32.242.884

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.577.772.234

**III. HUTANG** Rp. 420.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.157.772.234

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDY PARDEDE**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA**
3. NHK : **127491**

**II. DATA HARTA**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>1.314.874.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m <sup>2</sup> /68 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 392.874.000 |            |                      |
| 2. Bangunan Seluas 23 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 472.000.000                              |            |                      |
| 3. Bangunan Seluas 37 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000                             |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>515.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000   |            |                      |
| 2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER 6P TREND IVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000                                    |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>54.310.700</b>    |
| <b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>  | <b>Rp.</b> | <b>61.178.674</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>139.412.069</b>   |
| <b>Sub Total</b>  | <b>Rp.</b> | <b>2.084.775.443</b> |
| <b>III. HUTANG</b>  | <b>Rp.</b> | <b>271.089.264</b>   |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>  | <b>Rp.</b> | <b>1.813.686.179</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **PAULUS AGUNG C W**
2. Jabatan : **PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA**
3. NHK : **475929**

**II. DATA HARTA**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>1.959.500.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 920.500.000 |            |                      |
| 2. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.500.000                                   |            |                      |
| 3. Tanah Seluas 2.675 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 278.000.000                                 |            |                      |
| 4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.920 m2/750 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 500.500.000                           |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>9.250.000</b>     |
| 1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.250.000                                 |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>32.800.000</b>    |
| <b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>95.000.000</b>    |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>   | <b>Rp.</b> | <b>20.600.000</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>   | <b>Rp.</b> | <b>2.117.150.000</b> |
| <b>III. HUTANG</b>   | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>   | <b>Rp.</b> | <b>2.117.150.000</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMAD NAHDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG LELANG**
3. NHK : **755643**

**II. DATA HARTA**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>1.375.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/44 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000   |            |                      |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000 |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>460.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000                 |            |                      |
| 2. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000                              |            |                      |
| 3. MOBIL, SUZUKI BALENO HATCHBACK MINOR CHANGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000        |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>96.250.000</b>    |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>  | <b>Rp.</b> | <b>244.191.188</b>   |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>  | <b>Rp.</b> | <b>2.175.441.188</b> |
| <b>III. HUTANG</b>  | <b>Rp.</b> | <b>160.155.250</b>   |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>  | <b>Rp.</b> | <b>2.015.285.938</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BUDI SETIABUDI  
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI  
3. NHK : 966223

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.607.460.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.007.460.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 79.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000  
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 R Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 185.300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 46.494.900

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.509.622.900

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.427.877.800

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.427.877.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HAKIM SETYO BUDI MULYONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENILAIAN I
3. NHK : 428099

**II. DATA HARTA**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>   | <b>Rp.</b> | <b>900.000.000</b>   |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m <sup>2</sup> /52 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000 |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>196.250.000</b>   |
| 1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, LAINNYA Rp. 187.500.000   |            |                      |
| 2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000  |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>270.758.055</b>   |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>   | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>   | <b>Rp.</b> | <b>18.544.105</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>   | <b>Rp.</b> | <b>1.385.552.160</b> |
| <b>III. HUTANG</b>   | <b>Rp.</b> | <b>300.621.716</b>   |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>   | <b>Rp.</b> | <b>1.084.930.444</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ERNANDA SUHIRNA  
2. Jabatan : PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR/PENGAWAS KEUANGAN NEGARA  
MAHIR  
3. NHK : 682903

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 105.000.000

1. MOTOR, HONDA 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000  
2. MOBIL, TOYOTA INOVA INOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 14.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.442.786

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 2.000.000

**Sub Total** Rp. 535.442.786

**III. HUTANG** Rp. 345.900.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 189.542.786

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.